

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LULUS TAHSIN TAHFIDZ
(Studi Kebijakan terhadap Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung)



Oleh:

TEDI PRIATNA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2018

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarganya dan para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dalam pengimplementasian kebijakan lulus tahsin tahfidz bagi mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sehingga besar harapan peneliti bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya. Selain dari pada itu, penelitian ini juga merupakan bentuk implementasi dari salah satu kewajiban dosen untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, yakni penelitian.

Alhamdulillah, bersyukur kehadira Allah Swt., dan ucapan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapat terima kasih secara khusus tersampaikan kepada para Dekan yang dijadikan sebagai bahan pembanding dalam penelitian ini, terutama Dekan FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, para pembantu peneliti, dan Rektor yang telah memberikan kesempatan memperoleh bantuan dana penelitian ini.

Peneliti sangat menyadari betul bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Dan peneliti mempersilahkan apabila ada penelitian lain yang akan memperdalam dan mengembangkan penelitian ini. Mudah-mudahan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal'Alamin.*

Bandung, Desember 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Kerangka Berpikir	3
D. Penelitian Terdahulu	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Analisis Kebijakan	6
1. Pengertian Analisis Kebijakan	6
2. Teori Kebijakan	10
3. Tahap-tahap Analisis Kebijakan	12
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	13
B. Tahsin Tahfidz	22
1. Pengetian Tahsin dan Tilawah	22
2. Dasar Kewajiban Mempelajari Tahsin	22
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	24
A. Tujuan Penelitian	24
B. Manfaat Penelitian	24
BAB IV METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Metode Penelitian	27
C. Jenis Penelitian	27
D. Sumber Penelitian	28
E. Teknik Penelitian	29
F. Teknik Analisis Data Penelitian	30

BAB V	HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	32
A.	Hasil Penelitian	32
1.	Profil Tempat Penelitian	32
2.	Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Lulus Tahsin Tahfidz	38
3.	Monitoring Implementasi Kebijakan Lulus Tahsin Tahfidz .	43
4.	Strategi Fakultas dalam Implementasi Kebijakan Lulus Tahsin Tahfidz	47
5.	Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Lulus Tahsin Tahfidz	50
B.	Pembahasan	53
1.	Implementasi Kelembagaan	53
2.	Pelaksanaan Tahsin Tahfidz	55
3.	Kebijakan Pembimbingan Tahsin Tahfidz	57
4.	Metode Tahsin Tahfidz	57
5.	Evaluasi Tahsin Tahfidz	59
BAB VI	RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	61
BAB VII	SIMPULAN DAN SARAN	62
A.	Simpulan	62
B.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1, Penilaian tahsin Tahfidz Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung	44
Tabel 5.2, Penilaian Praktik Ibadah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	44
Tabel 5.3, Penilaian Qira'at Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 tentang Interaksi antar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	18
Gambar 2.2 tentang Model Proses Implementasi Kebijakan Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan	21
Gambar 2.3 tentang Model Implementasi	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ke Universitas Islam Negeri (UIN) sangat berdampak, terutama terhadap *input* dan seleksi jalur masuk mahasiswa.¹ *Pertama*, *input* mahasiswa. *Input* mahasiswa yang masuk ke UIN sangat heterogen, mulai dari lulusan Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maupun madrasah/sekolah yang berbasis pesantren. Dari *input* tersebut ditemukan beragam kemampuan mereka dalam baca tulis al-Quran. Sebab faktanya bahwa masih banyak ditemukan para mahasiswa yang masih belum lancar dalam membaca al-Quran.

Kedua, seleksi jalur masuk mahasiswa. Berdasarkan buku pedoman UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bahwa jalur penerimaan mahasiswa baru, terbagi kepada empat jalur, yaitu 1) Jalur seleksi nasional Kemenristekdikti; 2) Jalur seleksi nasional Kemenag; 3) Jalur mandiri; dan 4) Jalur khusus, yakni jalur hafidz al-Quran, minimal 5 juz dan prestasi minimal tingkat regional.² Kalau dianalisis bahwa jalur penerimaan mahasiswa baru, kecuali yang jalur khusus, hanya dilakukan dengan ujian tulis (CBT) saja, tanpa ada tes baca tulis Quran. Dengan demikian bahwa mahasiswa baru universitas tidak terdeteksi terhadap baik dan buruk bacaan al-Qurannya.

Padahal UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi Islam, sesuai dengan visinya bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak al-Karimah. Artinya bahwa lulusan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, selain menghasilkan mahasiswa yang dapat bersaing di dunia kerja, dan juga harus

¹ Perubahan IAIN ke UIN, berimplikasi kepada dibuka berbagai fakultas dan program studi umum.

² Buku Sistem dan Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017 dan Buku Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016.

menghasilkan lulusan yang fasih dan hapal dalam membaca al-Quran. Intinya bahwa mahasiswa lulusan UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus menjadi mahasiswa yang dapat mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama.

Sebagaimana data yang ditemukan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mahasiswa baru tahun 2015, sebanyak 1.206 orang, ada sekitar 560 orang (46%) orang mahasiswa, baik dari mahasiswa *dirasah* maupun non *dirasah*, yang belum lancar dalam membaca al-Quran, ada sekitar 646 orang (54%) sudah lancar tapi belum hafidz, dan sisanya 55 orang (5%) yang sudah hafidz.³ Padahal berdasarkan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bahwa kelulusan tahsin dan tahfidz dengan hapal minimal juz 30 merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasah.⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti ingin mencoba melakukan penelitian terhadap **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LULUS TAHSIN TAHFIDZ (Studi Kebijakan terhadap Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
2. Bagaimana monitoring implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
3. Bagaimana strategi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz mahasiswa?

³ Data dari Unit Pengembangan Tahsin Tahfidz Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018.

⁴ Buku Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016 dan Surat Keputusan Rektor Nomor: 178/Un.05/LI/PP.00.9/07/2016.

4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

C. Kerangka Berpikir

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan salah fakultas yang mempunyai visi, yaitu “terwujudnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang unggul, kompetitif, populis untuk menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional yang Islami di Indonesia tahun 2024”. Sedangkan misinya adalah: 1) Penguatan budaya akademik sivitas akademika berbasis akhlak karimah; 2) Pengembangan dan pemanfaatan pembelajaran berbasis riset (*classroom research*); 3) Penguatan layanan sistem informasi terpadu berbasis *Information Communication and Technology*; 4) Penguatan pengabdian pada masyarakat berbasis profesi keguruan; 5) Peningkatan peran dan fungsi jurusan/prodi untuk menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing; dan 6) Peningkatan kerjasama kemitraan untuk penguatan daya sanding lembaga.⁵

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tersurat bahwa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati ingin menghasilkan mahasiswa lulusan yang unggul, kompetitif, dan profesional. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka harus dalam bentuk misi, yakni penguatan budaya akademik yang kondusif. Sehingga jurusan/prodi dan unit pengembangan tahsin tahfidz sebagai lokomotif fakultas dapat mengimplementasikan dengan efektif dan efisien.

D. Penelitian Terdahulu

Poin ini peneliti ingin membuat perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menghindari adanya pengulangan (kesamaan) terhadap penelitian,

⁵ Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-594C/Un.05/III.2/PP.00.9/07/2016, tanggal 03 Juli 2016 tentang Revisi Rencana Strategis Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2015-2019.

terlebih menghindari adanya plagiasi. Berdasarkan atas hunting ke berbagai referensi, baik buku maupun perpustakaan, peneliti menemukan beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

1. Haedar Akib. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa model deskriptif manajemen implementasi kebijakan berbasis pengetahuan meliputi: “dimensi” (substansi isi, signifikansi atau urgensi, konteks, infrastruktur), “indikator” dan “kriteria pengukuran” dari berbagai model implementasi kebijakan sebagai sebuah sistem yang menekankan peranan dan fungsi aktor - pelaksana, pemangku kepentingan, dan kelompok target dalam memberdayakan kreasi pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan atau program. Gambaran rinci mengenai model ini akan dijelaskan dalam artikel yang lain.

Perbedaan dengan peneliti, penelitian tersebut konseptual model implementasi kebijakan, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada aspek implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz.

2. Ulum Erfiana. 2015. *Implementasi Program Tahsin pada Tilawah dan Tahfiz Al-Qur'an di Pondok Pesantren Darut Taqwa Putri Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Latar belakang diterapkannya program tahsin pada tilawah dan tahfiz al-Qur'an bagi santriwati Pondok Pesantren Darut Taqwa adalah untuk memperbaiki kualitas bacaan al-Qur'an santri yang masih rendah dan adanya peraturan dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Nasional yang menganjurkan lembaga-lembaga di bawah naungannya untuk mengedepankan pendidikan al-Qur'an. (2) Penerapan

program tahsin pada tilawah dan tahfiz al-Qur'an di Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo meliputi tahap persiapan, yaitu diadakannya pengelolaan untuk ustadz ustadzah berupa tahsin tilawah al-Qur'an khusus untuk ustadz ustadzah dan diadakan pembagian kelompok untuk para santri; tahap pelaksanaan, menggunakan metode sorogan; tahap evaluasi, setiap akhir semester baik semester gasal maupun semester genap diadakan ujian tahsin tilawah dan tahfidz al-Qur'an.

Perbedaan dengan peneliti, penelitian tersebut Penerapan program tahsin pada tilawah dan tahfiz al-Qur'an di Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada aspek implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan berbagai tindakan suatu lembaga yang terarah dan terimplementasikan oleh seluruh anggota (sivitas akademika) bertujuan untuk kepentingan publik. Menurut Hoogerwerf bahwa kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.¹ James E. Anderson, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.²

Menurut Kamus Webster bahwa implementasi adalah *to implementasi* ‘mengimplementasikan’, berarti *to provide means for carrying out; to give practical effect to* ‘menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu’.³ Dalam konteks kebijakan publik bahwa implementasi bukan hanya sekedar yang berhubungan dengan mekanisme pengambilan keputusan melalui birokrasi, akan tetapi sangat berhubungan dengan masalah konflik, keputusan, dan siapa yang mengimplementasikan suatu kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian implementasi menurut Charles O. Jones, bahwa *getting the job done* dan *doing it*.⁴ Dengan demikian, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.

¹ Sjahrir, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita), 66.

² James. E. Anderson, *Public Policy Making*, (USA: Houghton Mifflin Company, 2003), 2.

³ Abdul Wahab Solikhin, *Analisis Kebijakan dan Formulasi dan Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

⁴ Cahyono, *Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (CAROK) Etnis Madura melalui Criminal Justice System*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 70.

Akan tetapi dalam implementasinya, menurut Jones, menuntut adanya syarat yang antara lain: a) Adanya orang atau pelaksana dan b) Kemampuan organisasi. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Van Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai *policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*⁵ Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan beberapa keputusan menjadi pola-pola operasional dan dilanjutkan dengan usaha untuk mencapai perubahan yang diamanatkan dalam bentuk keputusan kebijakan.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier bahwa konsep implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu berbagai kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata kepada masyarakat.⁶

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial

⁵ Van Meter, Donalds & Carl E. Van Horn, *The Policy Implementation Process; a Conceptual Framework*, "Administration Society", Vol. 6, No. 4 (February 1975), 70.

⁶ Solikhin, *Analisis Kebijakan*, 65.

ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Banyak model dalam proses implementasi kebijakan yang dapat digunakan. Van Meter dan Horn dalam Samudra Wibowo, mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan (*a model of the policy implementation process*). Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.

Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.

Standar dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Di samping itu standar dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Artinya bahwa respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standar dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan.

Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain.

Hubungan antar sumberdaya (*resources*) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan. Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional. Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah tertentu, mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana, disposisi para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Kondisi lingkungan di atas mempunyai efek penting terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang telah mapan, kualitas, dan keadaan agen pelaksana (*implementor*). Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi disposisi *implementor*. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, hanya jika para *implementor* mau menerima tujuan, standar dan sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.

Di samping itu karakteristik para *implementor* dapat mempengaruhi disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan sasaran organisasi, dalam implemementasi kebijakan yang efektif

sangat tergantung kepada orientasi dari para agen (kantor *implementor*) kebijakan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

2. Teori Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.⁷ Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1975) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendinginkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”.⁸

Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sementara Carl Friedrich mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk

⁷ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 16.

⁸ Inu Kencana Syafii, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*, (Yogyakarta: Averros Press, 2008), 105.

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.⁹

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson (1969) yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.¹⁰ Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah.

Amir Santoso (1993), dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu: *pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. *Kedua*, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian

⁹ Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 17.

¹⁰ Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 18.

dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat- akibat yang bisa diramalkan.¹¹

Lebih lanjut, Effendi mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai: pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.¹²

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan tindakan untuk masyarakat.

3. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu: *pertama*, bersifat *self-executing*, bahwa kebijakan akan terimplementasikan dengan sendirinya, setelah dirumuskan dan disahkan suatu kebijakan, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. *Kedua*, bersifat *non self-executing*, bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.¹³

¹¹ Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, 19.

¹² Syafiie, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan*, 106.

¹³ M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 102-106.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut: Tahap pertama, terdiri atas kegiatan-kegiatan: a) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas; b) Menentukan standar pelaksanaan; c) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. Tahap kedua, merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumberdaya, prosedur, biaya serta metode. Tahap ketiga, merupakan kegiatan-kegiatan: a) Menentukan jadwal; b) Melakukan pemantauan; c) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian, jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.¹⁴

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan, penetapan waktu, dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (*target grup*), tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implelementasi kebijakan negara.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Warwick (1979), pada implementasi terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek yaitu: faktor pendorong (*facilitating conditions*) dan faktor penghambat (*impeding conditions*).

¹⁴ Wahab, *Analisis Kebijakan*, 36.

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong ini, terdiri dari: 1) Komitmen pimpinan politik: dalam praktek adalah terutama komitmen dari pimpinan pemerintah karena pimpinan pemerintah pada hakekatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa di daerah; 2) Kemampuan organisasi: dalam tahap implementasi program hakekatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti yang ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi; 3) Komitmen para pelaksana (*implementers*): salah satu asumsi yang sering kali terbukti keliru ialah jika pimpinan telah siap untuk bergerak, maka bawahan akan segera ikut.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat terdiri dari: 1) Banyaknya “pelaku” (*actors*) yang terlibat. Semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, makin rumit komunikasi makin besar kemungkinan terjadinya *delay* hambatan dalam proses pelaksanaan; 2) Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda. Dalam banyak kasus terjadi, pihak yang terlibat maupun seseorang yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan dalam menentukan ataupun menyetujui suatu proyek dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap proyek, waktunya tersita oleh tugas-tugas lainnya atau program lain; 3) Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri. Dalam hal ini berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat; 4) Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan. Demikian pula pada tahap operasi, penyaluran dana dan sumbangan yang diperlukan, memakan banyak waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak; dan 5) Faktor lain, seperti: waktu dan perubahan kepemimpinan. Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan pelaksanaan, makin besar kemungkinan

pelaksanaan menghadapi hambatan. Terlebih bila terjadi perubahan kebijakan.

George C. Edwards III menguraikan tentang beberapa pendekatan terhadap studi implementasi dari beberapa ahli, seperti Merelle S. Grindle (*case study approach*), pendekatan berdasarkan analisis keputusan oleh Graham Alison, pendekatan yang memandang (*implementation*) sebagai suatu 'game' oleh Eugene Bardach pendekatan yang dilakukan oleh Donald Van Matter dan Kart Van Horn serta yang paling akhir ialah menurut Paul Sabatier dan Daniel Mazmanian. Berdasarkan latar belakang pendapat para ahli tersebut diatas, Edwards III tiba pada pendekatan yang dipilihnya, dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pernyataan pokok yaitu: a) Hal-hal apa saja yang merupakan persyaratan bagi suatu implementasi yang berhasil? Dan b) Apa saja yang merupakan penghambat utama terhadap keberhasilan implementasi program?.

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna keberhasilan implementasi. Adapun Faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980), sebagai berikut:

a. Faktor Komunikasi

Dalam implementasi, menurut George C Edwards III (1980), komunikasi ini memiliki peranan penting, tidak hanya bagi para *implementor*, tapi juga bagi *policy maker*. Karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para *policy maker* dalam meminta para pelaksana (*implementor*) tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang penting adalah adanya konsisten komunikasi dari atas ke bawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas. Bila tidak, maka akan membuka peluang bagi para pelaksana untuk menafsirkan kebijakan tersebut. Atau dengan kata lain, perlu dihindari adanya suatu hal yang dapat menimbulkan suatu kegaduhan, kebingungan di antara para pelaksana, sebagai akibat dari adanya

kelonggaran-kelonggaran dalam menafsirkan kebijakan tersebut. Terpenting lagi harus adanya ketetapan dan keakuratan informasi kebijakan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tujuan yang sebenarnya ingin dicapai dari implementasi kebijakan tersebut, dan mereka dapat mengetahui dengan tegas dan jelas, apa yang seharusnya mereka lakukan.

Dengan kata lain, agar didapat implementasi yang efektif, para pelaksana harus mengetahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan untuk implementasi suatu kebijakan harus disampaikan pada orang-orang yang tepat, dan mereka harus menjadi jelas, akurat, konsisten terhadap ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut. Jika tidak, maka akan terjadi salah pengertian di antara mereka dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimana pun jelas dan konsisten ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya dalam menyampaikan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan sertifikasi, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf, dimana harus memiliki keahlian dan kemampuan yang bisa melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. Disamping itu, harus ada kesesuaian antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki sesuai dengan tugas yang akan dikerjakan, dan untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara

mengimplementasikan suatu kebijakan dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar di antara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kewenangan untuk menjamin atau menyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini, berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan (*law*) tidak akan menjadi kuat, layanan terpadu tidak akan diberikan secara maksimal, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang dibutuhkan tidak akan berkembang.

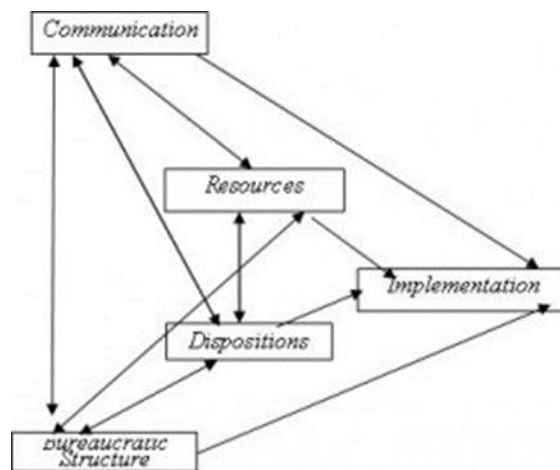
c. Faktor Kecenderungan (Disposisi)

Disposisi ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana dapat mengimplementasikan kebijakan dengan leluasa. Alasannya adalah adanya ketergantungan mereka terhadap superioritas orang-orang yang merumuskan kebijakan.

Alasan lainnya adalah karena kompleksnya kebijakan itu sendiri. Bagaimanapun juga cara mana yang dilakukan implementor dalam melakukan kekeleluasaan itu, sebagian besar tergantung pada kecenderungan mereka terhadap suatu kebijakan. Kemudian sikap itu akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap suatu kebijakan, dan bagaimana melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasi dalam bidang pendidikan yaitu Diknas dan pribadinya (agen implementor).

d. Faktor Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan kuat (komitmen) untuk melakukannya, implementasi bisa masih jadi belum efektif karena ketidakefisiensinya struktur birokrasi. Oleh karenanya, dalam pengimplementasian Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Dasar dan menengah, harus juga memperhatikan faktor struktur organisasi ini, di mana struktur organisasi birokrasi ini juga mempengaruhi derajat keberhasilan implementasi kebijakan program. Mengenai bentuk interaksi antar faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1

Interaksi antar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan bagan 2.1 dapat dikemukakan bahwa pengarahan yang disampaikan dengan tidak akurat, tidak jelas dan tidak konsisten, menyebabkan adanya kebingungan bagi para implementor di lapangan dalam mengimplementasi kebijakan tersebut. Pada pihak lain, komunikasi yang terlalu mendetail, dapat merendahkan moral dan mengurangi kebebasan para implementor, memungkinkan terjadinya perubahan arah kebijakan dalam pelaksanaannya di lapangan, dan terjadinya pemborosan sumber daya, seperti kecedasan, kreativitas, dan daya adaptif staf.

Agen implementor tidak lebih sekedar “robot” yang sebatas menjalankan prosedur tetap (prostatap) suatu kebijakan. Jadi dampak komunikasi terhadap implementasi juga dirasakan melalui sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber daya juga mempunyai pengaruh tidak langsung pada implementasi, yaitu melalui interaksi komunikasi dengan berbagai cara. Tidak cukupnya staf pelaksana juga menyebabkan tidak tercapainya apa yang menjadi arah suatu kebijakan. Jika sumber daya yang tersedia cukup banyak, menyebabkan individu dan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan itu melakukan persaingan ketat di antara mereka sendiri untuk menjaga kepentingan pribadi dan organisasinya.

Jadi dengan bertumpu pada penjelasan di atas, maka jelas bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi derajat keberhasilan implementasi kebijakan. Masing-masing faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi implementasi kebijakan.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn berpendapat dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakannya yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja (*performance*).

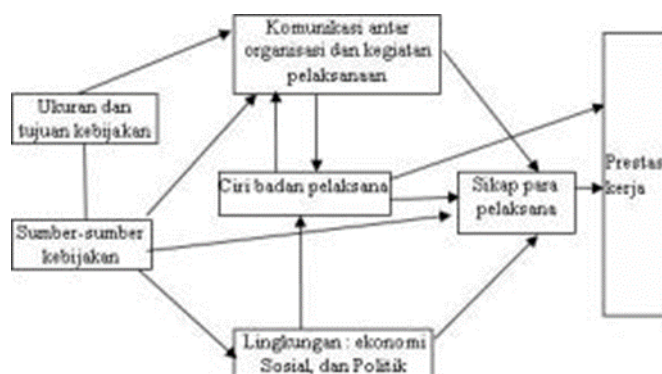
Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi ? Seberapa jauhkan tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur (masalah ini meyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatnya dalam organisasi yang bersangkutan).

Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi (Hal ini menyangkut masalah kepatuhan). Atas Dasar pandangan seperti ini Van Metter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut: a) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan; dan b) Jangkauan atau lingkup kesempatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesempatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

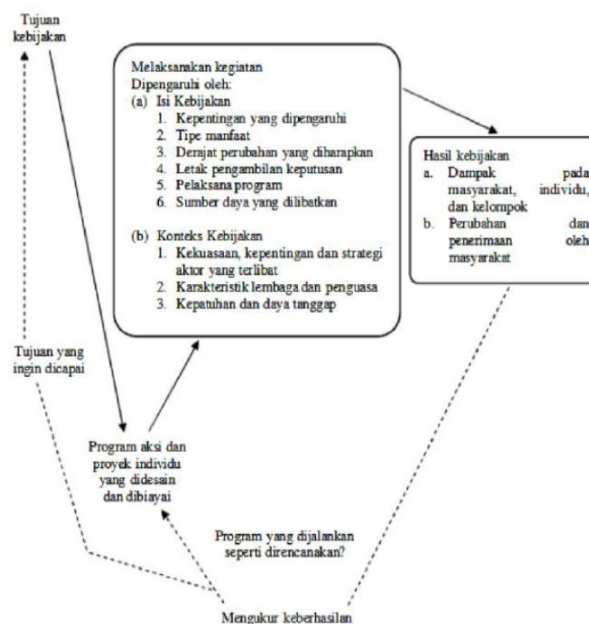
Hal lain yang dikemukakan oleh kedua ahli di atas ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas ini ialah: a) Ukuran dan tujuan kebijakan; b) Sumber-sumber kebijakan; c) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana; d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; e) Sikap para pelaksana; dan f) Lingkungan ekonomi, sosial, politik.

Variabel kebijakan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksan mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan.



Gambar 2.2
Model Proses Implementasi Kebijakan Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Berdasarkan pengertian implementasi dari Grindle, ia menyusun konseptual dan kerangka pemikiran mengenai implementasi sebagai suatu proses politik dan proses administrasi. Pertanyaan pertama mengenai *content* (isi). Pengaruh atau akibat apa yang dapat terjadi oleh karena isi program itu sendiri terhadap proses implementasi. Pertanyaan kedua, menyangkut *context* (yaitu kondisi lingkungan) yang mempunyai kaitan pengaruh atau hubungan terhadap implementasi. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, Grindle mengemukakan Model Implementasi seperti gambar Gambar 2.3.



B. Tahsin Tahfidz Al-Quran

1. Pengertian Tahsin dan Tilawah

Tahsin memiliki arti memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik, membuat lebih baik dari semula. Sedangkan *Tilawah* memiliki arti bacaan. Secara Istilah *tilawah* ialah membaca al-Quran dengan bacaan yang menjelaskan huruf-hurufnya dan berhati-hati dalam melaksanakan bacaannya, agar lebih mudah memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Kata *tahsin* hampir sama pengertiannya dengan kata tajwid yang merupakan bentuk mashdar dari *fi'il madhi, jawwada* yang berarti membaguskan, menyempurnakan, memantapkan. Pengertian tajwid secara istilah adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-hak huruf maupun hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf dipenuhi, yang terdiri atas sifat-sifat huruf, hukum-hukum mad, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah tafkhim, tarqiq, dan semisalnya.

2. Dasar Kewajiban Mempelajari Tahsin

Mempelajari tahsin *tilawah* lebih ditekankan daripada mempelajari ilmu tajwid, karena mempelajari tahsin hukumnya *fardlu 'ain* (wajib), sedangkan mempelajari tajwid hukumnya *fardlu kifayah*. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mempelajari tahsin ialah:

Pertama, Firman Allah Swt.:

... وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ...

“... Dan bacalah (olehmu) al-Quran dengan tartil yang sebenarbenarnya”
(Q.S. Al-Muzammil (73): 4)

Dalam ayat tersebut Allah telah menggunakan kata perintah: “Dan bacalah (olehmu) al-Quran dengan tartil”. Dalam ilmu Ushul Fiqh disebutkan bahwa pada asalnya sebuah perintah itu menunjukkan wajib, kecuali jika ada dalil yang shahih atau *qarinah* (indikasi) yang memalingkan dari perintah wajib tersebut.

Ayat tersebut digunakan sebagai dasar hukum dalam mempelajari tahsin. Hal ini disebabkan makna tartil yang terkandung dalam ayat tersebut memiliki kesamaan dengan makna tahsin. Kata *rattil* dan *tartil* terambil dari kata *ratala* yang berarti serasi dan indah. Tartil al-Quran adalah membaca al-Quran dengan perlahan-lahan sambil memperjelas huruf-huruf berhenti dan memulai (*ibtida'*), sehingga pembaca dan pendengarnya dapat memahami dan menghayati kandungan pesanpesannya. Dengan kata lain, *tartil* al-Quran berarti membaca al-Quran dengan menerapkan dan mengamalkan ilmu tajwid yang mana di dalamnya tercakup teori-teori tentang tata cara membaca al-Quran yang baik dan benar.

Kedua, perkataan ulama ahli *qira'at*, di antaranya apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mempelajari ilmu tajwid hukumnya *fardlu kifayah*, sedangkan hukum membaca al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid ialah *fardlu 'ain* bagi setiap muslim dan muslimah.

Dengan demikian jelaslah bahwa mempelajari *tahsin* tilawah adalah suatu kewajiban yang tidak perlu diperdebatkan secara panjang lebar. Karena dalil-dalil yang telah disebutkan di atas begitu gamblang menjelaskan kewajiban mempelajari tahsin *tilawah*. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah berusaha semaksimal mungkin mempelajari *tahsin* tilawah dengan baik dan benar. Tentunya tidak mempelajarinya secara otodidak, tetapi harus dengan seorang *muqri'* (pembimbing al-Quran yang mumpuni).

Implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada kelancaran dan keterpaduan menuju apa yang seharusnya, memiliki peranan penting yang dapat memberlakukan objek kebijakan mematuhi peraturan-peraturan yang telah dirumuskan oleh birokrasi melalui system *top down*. Salah satu kebijakan yang coba diterapkan adalah kewajiban menghafal 1 Juz al- Quran.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian pada bab I, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Untuk menganalisis monitoring implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Untuk menganalisis strategi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz mahasiswa.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara nyata, baik secara teoritis maupun praktis. *Pertama*, secara teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi secara konseptual dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islami, dalam bidang ilmu analisis kebijakan. *Kedua*, secara praktis. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi nyata terhadap: 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini diharapkan berkontribusi nyata bagi pengembangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam rangka mewujudkan mahasiswa yang mampu membaca secara fasih (tahsin) dan menghafal (tahfidz) al-Quran, sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Unit

Pengembangan Tahsin Tahfidz Fakultas. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam mengklasifikasikan mahasiswa, baik mahasiswa yang lancar, belum lancar, dan tidak lancar membaca al-Quran; 3) Jurusan/Program Studi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi Jurusan/Prodi dalam membuat pola pembinaan para mahasiswa yang belum dan tidak lancar membaca al-Quran; dan 4) Mahasiswa. Penelitian ini diharapkan menjadi motivasi bagi para mahasiswa dalam menyelesaikan kuliah tepat waktu.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.¹ Sebab penelitian ini peneliti akan berusaha untuk menjelaskan dan menginterpretasikan fakta sesuai dengan apa adanya.² Pendekatan ini dipilih, karena pendekatan penelitian ini akan mampu mendeskripsikan, menganalisis, dan bahkan sekaligus memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe-tipe informasi, dan mendeskripsikan fenomena. Adapun fakta yang ada dalam penelitian ini adalah masih banyak mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati yang belum fasih dan hapal al-Quran, terutama juz 30. Sehingga penelitian ini diharapkan akan diperoleh konseptual model strategi lulus tahsin tahfidz bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati sebagai bentuk kontribusi terhadap implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh al-Jamiah.

Ada beberapa pertimbangan peneliti dalam menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, antara lain: *pertama*, ingin mengembangkan terhadap berbagai data yang ditemukan di lapangan yang sesuai dengan apa adanya, sehingga menghasilkan simpulan yang komprehensif. *Kedua*, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah aspek kebijakan. *Ketiga*, bidang kajian dalam penelitian ini berkenaan dengan proses atau aktivitas pencapaian tujuan kelembagaan yang di

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

² Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 157 dan Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 59.

dalamnya terjadi peristiwa interaktif antara berbagai komponen.

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka yang dijadikan sebagai metode penelitian adalah metode penelitian studi kasus (*case study*).³ Sebab peneliti ingin mengidentifikasi hakikat suatu aktivitas pada waktu dan tempat tertentu yang berkembang seiring berjalannya waktu serta tentunya dengan menyampingkan pengalaman peneliti.⁴

C. Jenis Penelitian

Sebagaimana pendekatan dalam penelitian yaitu mendeskripsikan fenomena di lapangan yang disajikan dalam bentuk kata-kata (deskripsi) dan bersifat aktual, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif (*descriptive research*).⁵ Jenis penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang (faktual).⁶ Artinya bahwa dalam penelitian ini peneliti mencoba akan menjelaskan fenomena dan situasi kelompok tertentu secara akurat dan faktual.

Ada tiga yang menjadi pertimbangan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif ini, antara lain: 1) Dilihat dari sifat penelitian, yaitu mendeskripsikan suatu peristiwa yang bersifat faktual, yakni manajemen pembiayaan pendidikan pesantren dan mutu; 2) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi partisipan, yaitu peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian; dan 3) Mencari informasi yang bersifat faktual dan dilakukan secara mendetail, maka peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam.⁷

³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998), 147 dan Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 54.

⁴ Creswell, *Educational Reaserch; Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, (Boston: Pearson Education, Inc., 2012), 465 dan Nasution, *Metodologi Penelitian*, 7.

⁵ John W. Creswell, *Educational Reaserch*, 472.

⁶ Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 139 dan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 41.

⁷ Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 41.

D. Sumber Penelitian

Sumber data adalah asal muasal data yang dijadikan sebagai pusat pencarian informasi untuk dijadikan sebagai bahan kajian dan telaah dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data manusia dan bukan manusia. Kedua jenis data ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lainnya dalam rangka untuk memperoleh data (informasi) penelitian.

Pertama, sumber data manusia. Sumber data berupa manusia ini berfungsi sebagai peneliti utama (*key person*). Dalam desain penelitian kualitatif, bahwa peneliti menjadi instrumen penelitian utama (*the instrument of choice in naturalistic inquiry is the human*).⁸ Dalam hal ini peneliti wajib hadir secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Maka dari itu, peneliti bertindak sebagai instrumen dan sekaligus sebagai pengumpul data. Untuk memperoleh jenis informasi ini, peneliti melakukan dengan cara wawancara yang mendalam. Selama pengumpulan data di lapangan, peneliti menempatkan diri sebagai instrumen dan sekaligus sebagai pengumpul data. Sebagai seorang instrumen penelitian yang mengumpulkan data, maka seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Peneliti harus memiliki kepekaan dalam memilah dan memilih data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti; dan 2) Peneliti harus dapat menyesuaikan dengan diri dengan situasi dan kondisi lokasi penelitian.⁹

Kedua, sumber data yang bukan manusia. Sumber data jenis ini adalah lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai sumber untuk memperoleh informasi. Untuk memperoleh jenis informasi ini, peneliti melakukan dengan cara observasi dan studi dokumen-dokumen, serta studi kepustakaan.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 306-307.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 307-308.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi partisipan (*participan observation*), dan studi dokumentasi (*study document*). Ketiga teknik tersebut digunakan secara bergantian, berulang-ulang sesuai dengan keperluan dan kondisi pelaksanaan pengumpulan data.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan supaya peneliti memperoleh banyak (komprehensif) dan detail (lengkap) informasi tentang permasalahan penelitian.¹⁰ Oleh karena itu, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Sebab peneliti melakukan dialog secara langsung dengan tidak terlalu terfokus pada instrumen yang telah dibuat,¹¹ sehingga dalam pelaksanaan penelitian peneliti akan lebih bebas, yang pada akhirnya akan memperoleh informasi yang lengkap.

Waktu pelaksanaan dan sumber informasi (informan) antara lain: pendiri (pembina) yayasan, ketua yayasan, ketua lembaga, ketua unit, perwakilan ustadz/ustadzah, perwakilan santri, dan informan lainnya yang dianggap relevan. Adapun yang menjadi pertimbangan partisipan, antara lain: 1) Bahwa mereka dianggap menguasai dan memahami permasalahan dalam penelitian ini; 2) Bahwa mereka sedang berkecimpung atau terlibat dalam aktivitas yang sedang diteliti; dan 3) Bahwa mereka memiliki waktu yang cukup.¹²

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi melalui pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Hal dilakukan supaya peneliti mengetahui secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi di

¹⁰ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 320 dan Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), 111.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 303.

lokasi penelitian.¹³ Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung (*direct observation*) dengan menggunakan jenis observasi partisipan.¹⁴ Di mana peneliti mengamati secara langsung kegiatan sehari-hari, akan tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut (observasi partisipasi pasif).¹⁵

3. Studi Dokumentasi (*Study Document*)

Dokumen tertulis sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena: 1) Ada kemungkinan informasi yang disampaikan oleh partisipan belum lengkap dan 2) Untuk memperkuat terhadap hasil observasi maupun wawancara yang sudah dilakukan.¹⁶ Adapun data yang akan diambil dalam penelitian ini berupa data *official document* (dokumen resmi). Dalam studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data, terutama data-data secara teoritis, yang akan mendukung untuk memahami dan menganalisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis data dilakukan dengan cara menelaah, menata, membagi menjadi satuan-satuan, menyintesis, mencari pola, menemukan makna, dan melaporkan secara sistematis. Data tersebut terdiri dari deskripsi-deskripsi yang rinci tentang situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku. Teknik analisis data yang digunakan dalam satu kasus ini mengacu pada Model Interktif Miles, dkk.,¹⁷ mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

¹³ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Pendekatan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 194.

¹⁴ Robert K. Yin, *Case Study Research; Design and Methods*, (London: SEGA Publications Inc., 2009), 109.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 310-312.

¹⁶ Yin, *Case Study Research*, 101.

¹⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis; a Methodes Sourcebook*, (The United States of America: Arizona State University, 2014), 31-33.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data yang berupa hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data ini disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang digunakan pada penelitian kualitatif ini dan digunakan peneliti adalah dalam bentuk teks naratif. Terkait dengan display data, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel yang dibuat oleh peneliti.

3. Simpulan (*Conclusions*)

Dalam penelitian ini diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut diperoleh simpulan yang tentatif, agak kabur, kaku dan mungkin meragukan, sehingga simpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi data adalah penjelasan tentang makna data dalam suatu konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur kausalnya, sehingga dapat diajukan proposisi-proposisi yang terkait dengannya. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga simpulan yang diambil tidak menyimpang.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil Penelitian

1. Profil Tempat Penelitian

a. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fakultas Tarbiyah dan keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung merupakan salah satu fakultas dari UIN Sunan Gunung Djati yang dulu bernama IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, secara resmi berdiri pada tahun 1968 berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama No.57/1968.

Pada awalnya, Fakultas Tarbiyah terdiri dari dua jurusan yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, baik dari segi animo peserta didik maupun jumlah lembaga pendidikan yang membutuhkan tenaga-tenaga pengajar pada beberapa bidang studi umum, pada tahun 1982 Fakultas Tarbiyah membuka jurusan Tadris dengan tiga bidang studi; yaitu bidang IPS, Matematika dan Bahasa Inggris. Pada tahun 1987 bertambah satu bidang lagi, yaitu bidang IPA. Sementara untuk memenuhi kebutuhan guru agama di SD dan MI, pada tahun 1989 Fakultas Tarbiyah membuka Program Diploma Dua. Pada tahun 1996 disusul dengan membuka D3 penyetaraan. Kemudian pada tahun 1994 membuka Program Akta Mengajar IV untuk para guru agama lulusan S1 non-Tarbiyah.

Pada tahun akademik 1998/1999, Fakultas Tarbiyah menyelenggarakan program akademik dengan Jurusan/Program Studi sebagai berikut: Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Jurusan Psikologi, Jurusan Pendidikan dan Tadris, dengan Program Studi Bahasa Inggris, program Studi Matematika, Program Studi Biologi, Program Studi Fisika, Program Studi Kimia, Program Studi Teknik Informatika. Selain itu diselenggarakan pula Program Diploma Dua Bidang D2 GPAI SD/MI, Bidang D2 Pendidikan Guru MI, Bidang D2 Pendidikan Guru RA/TKI dan Program Akta Mengajar IV.

Seiring dengan perubahan status IAIN menjadi UIN tahun 2005, Program Studi Teknik Informatika (TI) bergabung dengan Fakultas Sain dan Teknologi, dan pada tahun akademik 2006-2007, dan jurusan psikologi berkembang menjadi fakultas tersendiri. Maka sekarang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan memiliki 5 (lima) jurusan dan 6 (enam) Program Studi yakni Jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang sekarang menjadi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Jurusan Pendidikan MIPA dengan Program Studi Pendidikan matematika, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Fisika, Program Studi Pendidikan Kimia, dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Dengan penetapan visi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati yaitu untuk menjadi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati yang Unggul, Kompetitif dan Populis di tingkat Nasional dan Internasional menuju ISO, 9001:2008 pada tahun 2014 dijadikan sebagai acuan kebijakan dan program. Mulai tahun 2012 arah pengembangan FTK secara sistematis dituangkan dalam Rencana Strategis FTK 2012-2016. Pada periode ini FTK melakukan upaya perbaikan mutu dan layanan akademik secara terus menerus (*continues quality improvement*), peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan organisasi dan kemahasiswa-an, penataan organisasi dan tata kerja (ortaker), modernisasi fasilitas, peningkatan kapasitas teknologi informasi, penataan manajemen dan sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan pegawai dan aspek pendukung lainnya. Sementara itu, adaptasi dan respon aktif terhadap berbagai tantangan eksternal telah dilakukan FTK UIN SGD Bandung melalui upaya pemenuhan tuntutan kualitas lulusan, pemenuhan standar mutu internasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk respon terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan produk turunannya, seperti peraturan tentang program profesi guru, serta pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang berasaskan persamaan hak dan kesempatan untuk memperoleh akses yang lebih mudah dengan biaya yang terjangkau.

Pengembangan FTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung selama lima tahun ke depan yang dipedomani oleh Renstra FTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2012-2016 merupakan proses pendewasaan dan pengokohan jati diri, sebagai Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang “Unggul, Kompetitif dan Populis”. Kondisi objektif FTK yang ingin dicapai bahwa FTK UIN SGD Bandung ingin berada pada tatanan kelembagaan dan manajemen yang kokoh, serta memiliki program dan layanan akademik yang bermutu, yang didukung oleh fasilitas yang modern. Sejalan dengan visi FTK yang menjangkau jauh ke depan, tuntutan untuk menjadi FTK UIN SGD Bandung kelas dunia (*world class*) masih merupakan tantangan yang harus diwujudkan. Upaya untuk mewujudkan diri menjadi FTK kelas dunia ini pada dasarnya merupakan bentuk komitmen dan pengabdian FTK dalam memberikan layanan mutu terbaik bagi masyarakat Indonesia dan dunia pendidikan. Komitmen ini, selain merupakan tekad untuk mampu berperan lebih baik dan lebih banyak bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, FTK dengan sendirinya tampil lebih baik dan lebih kokoh sebagai FTK yang bermartabat.

Berdasarkan kondisi di atas, dalam lima tahun ke depan FTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung akan melakukan upaya pengembangan dengan berfokus kepada (1) peningkatan mutu kinerja dan layanan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (2) pemantapan pendidikan profesional guru dan tenaga profesional lainnya, (3) peningkatan mutu manajemen dan sumber daya, (4) penataan kelembagaan, (5) peningkatan citra, kemitraan, dan internasionalisasi, dan (6) peningkatan mutu pembinaan dan layanan kemahasiswaan. Keenam fokus pengembangan FTK ini dijiwai oleh Renstra UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2011-2015 sebagai lembaga yang menaunginya. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menempatkan ilmu keislaman serta nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan sebagai sentral pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi, baik pada pengembangan keilmuan dan pendidikan, penelitian dan kajian, maupun pada pengabdian kepada masyarakat. Kiprah sentral ini merupakan jati diri utama yang tetap dipegang dan terus diperkuat sampai saat ini.

Ketika IAIN Sunan Gunung Djati Bandung berubah menjadi Universitas Islam Negeri, pada bulan Oktober 2005 berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 57 tahun 2005, selain nama fakultas diubah menjadi Fakultas Tabiyah dan Keguruan, jurusan dan program studinya pun telah berkembang menjadi lebih banyak, yang meliputi: 1) Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI); 2) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), terdiri dari: a) Program Studi Pendidikan Agama Islam; dan b) Program Studi Pendidikan Guru RA (PGRA); 3) Jurusan Pendidikan Bahasa, terdiri atas: a) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA); dan b) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI); 4) Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (PMIPA), terdiri dari: a) Program Studi Pendidikan Matematika; b) Program Studi Pendidikan Fisika; c) Program Studi Pendidikan Kimia; dan d) Program Studi Pendidikan Biologi; dan 5) Jurusan Pendidikan Guru MI (PGMI)

Dalam kurun waktu 45 tahun, sejak tahun 1968 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah mengalami beberapa kali perubahan dan penggantian kepemimpinan. Berdasarkan catatan sejarah, para pimpinan yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas secara berturut-turut adalah sebagai berikut: 1) Drs. H. Utuy Turmudzi dari tahun 1968 s.d. 1972; 2) Drs. H. Fathurrahman dari tahun 1972 s.d. 1976; 3) Drs. H. Yoesoef Iskandar dari tahun 1976 s.d. 1980; 4) Drs. H. Ishak Soleh dari tahun 1980 s.d. 1984; 5) Prof. Drs. H. Ahmad Supardi dari tahun 1984 s.d. 1992; 6) Dr. H. Busyrol Karim dari tahun 1992 s.d. 1996; 7) Prof. Dr. H. Ahmad Tafsir dari tahun 1996 s.d. 2004; 8) Prof. Dr. H. Afifuddin, M.M. dari tahun 2004 s.d. 2011; 9) Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. dari tahun 2011 s.d. 2015; dan 10) Dr. Tedi Priatna, M.Ag. dari tahun 2015 s.d. 2019.

b. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) adalah salah satu fakultas tertua yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. FITK bermula dari Jurusan Pendidikan Agama pada Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berdiri pada 1 Juni 1957. Ketika ADIA di Jakarta dan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) di Yogyakarta digabung menjadi IAIN Al-Jami'ah al-Islamiyah al-

Hukumiyah pada tahun 1960, IAIN Cabang Jakarta disertai tugas mengelola Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab. Sementara IAIN di Yogyakarta diberi tugas mengelola Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syariah.

Pada saat didirikan, Fakultas Tarbiyah memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan Pendidikan Guru Agama, Jurusan Pendidikan Guru Bahasa Arab, dan Jurusan Khusus (Imam Tentara). Jurusan terakhir ini, yang juga disebut Jurusan Da'wah wal Irsyad, bergabung dengan Fakultas Ushuluddin ketika fakultas ini didirikan pada tahun 1962.

Pada perjalanan selanjutnya, Fakultas Tarbiyah mengalami berbagai perubahan, terutama dalam jumlah dan nomenklatur jurusan. Jurusan Paedagogi, misalnya, dulu sempat hadir dan kemudian ditiadakan. Demikian juga dengan jurusan-jurusan pendidikan Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia yang dikembangkan pada awal tahun 1980-an dengan nama Jurusan Tadris, dihentikan pada tahun 1986 dengan tidak diperbolehkan untuk menerima mahasiswa baru. Akan tetapi, karena desakan kebutuhan di lapangan, jurusan-jurusan tersebut dikembangkan lagi pada dekade 1990-an. Perubahan IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Tahun 2002 berimplikasi pada pengembangan jumlah Jurusan dan Program Studi baru. Bahkan sejak tahun 2009, FITK mendapat mandat untuk menyelenggarakan program pendidikan S2, seiring dengan tuntutan lionieritas penyelenggara Program Pasca Sarjana.

Saat ini, jurusan dan program studi yang dimiliki FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut: 1) Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam; 2) Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Arab; 3) Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris; 4) Jurusan/Program Studi Pendidikan Matematika; 5) Jurusan Pendidikan IPA, dengan 3 program studi: a) Program Studi Pendidikan Biologi; b) Program Studi Pendidikan Fisika; dan c) Program Studi Pendidikan Kimia; 6) Jurusan Program Studi Manajemen Pendidikan; 7) Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah; 8) Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; 9) Jurusan/Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); 10) Jurusan/Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD); dan 11) Program Magister: a) Pendidikan Agama

Islam; b) Pendidikan Bahasa Inggris; c) Pendidikan Bahasa Arab; dan d) Manajemen Pendidikan Islam.

c. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Keberadaan Fakultas Tarbiyah sebagai pendiri pendidikan tinggi Islam di Indonesia tidak terlepas dari munculnya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang didirikan di Yogyakarta pada 14 Agustus 1950 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34/1950. Meskipun kuliah ini berada di bawah pengawasan Departemen Agama Republik Indonesia, operasional perguruan tinggi ini dilakukan bersama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan tingkat menteri No K/I/14641/1951 dan No. 28665/Kab/1951. Sekolah ini memang dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga terampil di ajaran Islam untuk memenuhi kebutuhan intelektual masyarakat dan negara karena penduduk Muslim merupakan mayoritas.

Sejalan dengan perkembangan PTAIN, pada 1 Januari 1957 Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) didirikan di Jakarta berdasarkan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957. Akademi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas guru Islam untuk sekolah menengah.

Pada dekade pertama baik PTAIN dan Adia tumbuh dan berkembang secara dramatis. Dalam rangka meningkatkan kontrol kualitas institusi secara integral, PTAIN dan Adia digabung menjadi lembaga baru bernama Institut Agama Islam Negeri pada 24 Agustus 1960 berdasarkan tingkat pemerintah No 11/1960. Lembaga ini terletak di Yogyakarta memiliki empat fakultas, yaitu Tarbiyah dan Adab di Jakarta dan Syari'ah dan Ushuluddin di Yogyakarta. Berdasarkan derajat No 26/1965 pemerintah, IAIN Yogyakarta diberi nama IAIN Sunan Kalijaga, nama berasal dari pengkhotbah Islam yang beredar di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan semua empat fakultas di Yogyakarta.

Sekarang Tarbiyah sebagai salah satu fakultas terkemuka di IAIN Sunan Kalijaga memiliki empat departemen, yaitu, Pendidikan Agama Islam (Islam Pengajaran), Pendidikan Bahasa Arab (Bahasa Arab Pengajaran), Kependidikan

Islam (Pendidikan Islam), dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Pendidikan Guru MI).

2. Pelaksanaan Tahsin Tahfidz

a. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pelaksanaan tahsin tahfidz di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ditanggungjawab oleh suatu lembaga khusus. Lembaga tersebut dinamakan dengan lembaga tahsin tahfidz. Tahsin tahfidz difungsikan sebagai unit pengembangan yang melakukan kegiatan untuk mengetes kemampuan tahsin dan tahfidz para mahasiswa. Melalui bidang ini diselenggarakan pembinaan secara intensif untuk standarisasi kemampuan baca tulis al-Quran para mahasiswa, terutama juz 30 sebagai syarat bagi mahasiswa mengikuti ujian munaqasah.¹

Secara pelaksanaan tahsin tahfidz dilakukan dengan tiga cara, yaitu: tes awal (*placement test*), pembimbingan, dan tes akhir (pengujian). *Pertama*, tes awal (*placement test*). Seluruh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, melakukan tes awal (*placement test*). Tes ini dilakukan dalam rangka untuk mengelompokkan mahasiswa tiga kategori, yaitu: belum lancar, sudah lancar, dan sudah hafal (hafidz).

Selain mengikuti prosedur yang ada di unit pengembangan tahsin tahfidz, para mahasiswa FTK UIN Sunan Gunung Djati juga harus sudah lulus melalui mata kuliah praktik ibadah dan tilawah. Untuk praktik ibadah dan tilawah merupakan syarat untuk mengikuti ujian komprehensif. Sedangkan surat keterangan lulus tahsin tahfidz yang dikeluarkan oleh unit pengembangan tahsin tahfidz merupakan syarat untuk mengikuti ujian munawaqasah.

Faktanya bahwa ada sekitar 560 orang (46%) orang mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, baik dari mahasiswa *dirasah* maupun non *dirasah*, yang belum lancar dalam membaca al-Quran. Ada

¹ Buku Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016 dan Surat Keputusan Rektor Nomor: 178/Un.05/LI/PP.00.9/07/2016.

sekitar 646 orang (54%) sudah lancar tapi belum hafidz, dan sisanya 55 orang (5%) yang sudah hafidz.²

Kedua, pembimbingan. Setelah para mahasiswa melakukan tes awal, maka ditemukan tiga kategori tersebut. Bagi mahasiswa yang belum lancar dan sudah lancar tapi belum hafidz, melakukan proses pembimbingan. Proses pembimbingan dilakukan oleh dosen maupun teman sebaya. Tugas dosen pembimbing adalah mengarahkan dan mendampingi para mahasiswa yang terkategori kepada dua hal tersebut. Dalam pembimbingan para mahasiswa diberikan buku setora bimbingan. Sedangkan tugas teman sebaya adalah mahasiswa yang mendampingi, terutama bagi mahasiswa yang belum lancar dalam membaca al-Quran. Maka proses pendampingan tersebut dilakukan oleh para mahasiswa yang sudah hafal. Artinya sebelum mereka setor hafalan ke dosen pembimbing, mereka diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan proses pendampingan oleh teman sebayanya.

Metode yang digunakan dalam pembimbingan didasarkan pada prinsip, sebagai berikut: 1) *al-Talaqqī wa al-Musyāfahah*, yaitu dosen pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing bertemu langsung, dosen pembimbing terlebih dahulu memberikan contoh dalam pelafalan bacaan/hafalan secara fasih, sehingga mahasiswa dapat melakukan peniruan; 2) *Murāja'ah*, yaitu proses pengulangan bacaan/hafalan mahasiswa yang dilakukan bersama dengan dosen pembimbing, dosen pembimbing hanya menyimak dan membetulkan kesalahan bacaan mahasiswa; dan 3) Setoran hafalan.

Ketiga, tes akhir (pengujian). Setelah para mahasiswa menyelesaikan setoran ke dosen pembimbing, maka dosen pembimbingan memberikan rekomendasi kepada unit pengembangan tahsin tahfidz untuk dilakukan proses tes akhir. Setelah mereka dapat menyelesaikan tes tersebut, maka unit tahsin tahfidz akan mengeluarkan surat keterangan dan nilai. Surat keterangan tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasah.

Adapun kriteria kelulusan dan diberikan surat keterangan lulus tahsin tahfidz, nilai minimalnya adalah 70. Nilai tersebut artinya adalah dari aspek tahsin

² Data dari Unit Pengembangan Tahsin Tahfidz Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018.

terketegorikan cukup konsisten dalam bacaan dan aspek tahfidz cukup lancar dalam hafalan. Sehingga dengan berbekal hafalan tersebut, para mahasiswa diharapkan di masyarakat layak untuk menjadi imam shalat maupun memimpin pengajian al-Quran.

b. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pelaksanaan tahsin tahfidz yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dilakukan melalui praktikum ibadah dan qira'at. Kegiatan praktikum ibadah dan Qira'at ini didasarkan atas landasan moral yakni: 1) Tanggung jawab institusi FITK terhadap kesahihan pelaksanaan ibadah dan qira'at para mahasiswa; dan 2) Memelihara citra yang baik di masyarakat terhadap FITK UIN Jakarta.

Adapun landasan formal kegiatan praktikum tersebut adalah peraturan Rektor IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 03, Tahun 1978, bab III pasal 9 ayat 1. Praktikum ibadah dan qiraat atau disingkat PIQI adalah proses bimbingan dan pembinaan terhadap mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual ibadah secara baik dan benar (sah) menurut hukum Islam dan mampu secara terampil membaca al-Quran dengan baik, benar, fasih dan lancar.

Adapun ruang lingkup PIQI adalah: *pertama*, praktikum ibadah. Pelaksanaan ibadah sehari-hari dan ibadah temporer (ibadah untuk peristiwa tertentu) baik yang wajib maupun yang sunnah meliputi: a) Bersuci dari hadast dan najis; b) Shalat Wajib dan Sunnah; c) Khutbah; d) Shalat Jumat, termasuk bila ada makmun masbuq; e) Shalat jama' dan Qashar; f) Sujud Syahwi, sujud tilawah dan sujud syukur; g) Pengurusan jenazah; dan h) Dzikir dan doa-doa (istikharah, tahajud, dhuha, istisqa, tarawih, dan witr). Kedua, praktikum qira'ah. Pelaksanaan membaca al-Quran meliputi: a) Adab membaca Al-Quran; b) Kelancaran membaca (qira'at); c) Hukum Tajwid; d) Makhraj dan sifat; e) Al-Gharaib; f) Hafalan juz ke-30 dan ayat-ayat surat pilihan; dan g) Menulis surat-surat pendek al-Quran.

Praktikum ibadah qira'ah adalah proses bimbingan (perkuliahan) yang tidak memiliki bobot sks (non sks) tetapi wajib diikuti seluruh mahasiswa FITK sampai dinyatakan lulus, karena menjadi syarat untuk mengikuti ujian skripsi (munaqosah).

Praktikum ibadah dan qiraat dilaksanakan sepanjang semester I dan II (satu tahun) yakni sebanyak 16 (enam belas) kali tatap muka yang secara teknis waktu dan tempatnya didasarkan pada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa.

Adapun tahapan kegiatan dari program PIQI inis sebagaimana berikut:

1) Kegiatan pendahuluan

Pelaksana kegiatan PIQI (laboratrium FITK) melakukan koordinasi dengan semua jurusan terkait nama-nama calon peserta PIQI, kemudian laboratorium FITK mengumumkan nama-nama calon peserta PIQI melalui papan pengumuman di setiap lantai, lalu disetiap kelompok terdapat ketua kelompok yang harus mengambil perlengkapan (kartu bimbingan, buku panduan, dan modul praktikum) PIQI di sekretariat Lab. FITK untuk dibagikan ke anggota kelompoknya, setelah itu Lab. FITK merekomendasikan nama-nama calon dosen pembimbing untuk ditetapkan dalam SK Dekan FITK, kemudian yang terakhir Lab. FITK mengadakan rapat koordinasi bersama pimpinan fakultas, jurusan, dosen pembimbing dan ketua kelompok.

2) Kegiatan Pelaksanaan

Adapun tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut: a) Setiap kelas dibagi menjadi dua rombongan belajar. Masing-masing rombel dibimbing oleh satu dosen pembimbing; b) Dosen Pembimbing mengadakan pertemuan dengan seluruh mahasiswa bimbingannya untuk menyampaikan beberapa ketentuan PIQI. Di samping itu, membuat jadwal tatap muka sesuai dengan kesepakatan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa; c) Mahasiswa melakukan pendalaman materi PIQI secara mandiri melalui modul praktikum; d) Secara bertahap (maksimal sampai 16 kali tatap muka) mahasiswa melakukan uji kecakapan sesuai tuntutan materi yang harus dikuasai; dan e) Setiap tatap muka mahasiswa wajib membawa kartu bimbingan, al-Quran dan modul PIQI.

c. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Salah satu program pengejawehtahan dari Program Kemahasiswaan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu Bidang

Pengembangan Kepribadian dan Tahsinul Quran (PKTQ). Bidang ini intens dalam pengembangan kepribadian melalui pendekatan terbaru dalam keakhlakan dan memperbaiki serta mendampingi para mahasiswa dalam mempelajari keilmuan al-Quran Secara struktural, Bidang Pengembangan Kepribadian dan Tahsinul Quran langsung berada di bawah komando Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama). Dalam bahasa lain PKTQ merupakan bentuk nyata hajat wakil Dekan III yang berusaha mem-backup para mahasiswa untuk dapat berkepribadian sesuai dengan keislaman dan keindonesiaan serta berlandaskan pada jiwa pendidik.

Secara historikal, Pengembangan Kepribadian dan Tahsinul Quran merupakan hasil pembacaan di lapangan oleh para dosen yang prihatin dengan kondisi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan secara khusus dalam penguasaan keilmuan al-Quran. Penguasaan keilmuan al-Quran yang seringkali menjadi sorotan yaitu kemampuan membaca kurang fasih dan pemahaman secara parsial. Pembacaan ini terkait dengan idealisme UIN Sunan Kalijaga yang tertuang dalam integrasi-interkoneksi, menuntut mahasiswa untuk bisa mengakomodir dan menguasai keilmuan keagamaan dan keilmuan modern.

Hal ini terkait pula dengan visi misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yaitu “mengembangkan pendidikan berbasis keislaman, pengetahuan, teknologi, seni, dan keindonesiaan”. Hal tersebut menggambarkan sebuah cakupan akan cita-cita idealitas fakultas yang ingin menjembatani antar keilmuan keislaman dengan berlandaskan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Banyak sekali kearifan yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran al-Quran dengan menekankan tahsīn-nya tidak bisa terlepas dari konsep pembentukan maupun proses yang berjalan. Dalam hal pembentukan kepribadian berkarakter (*character building*) tidak bisa serta merta terbentuk dengan sendirinya melainkan dengan pembiasaan dan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Pembentukan awal dari tahsīn al-Quran dan pembentukan kepribadian dapat dilihat dalam tingkah laku. Dalam tataran ini, PKTQ hanya bersifat akomodatif dengan menjadikan mereka sebagai panitia pelaksana dan asisten pembelajaran. Proses selanjutnya yaitu pembahasan instrument pembelajaran mealui program Workshop Kurikulum (WK). Setelah itu, para asisten

pendamping asistensi diberikan pembekalan pengetahuan melalui kegiatan *Training of Trainers* (ToT). Langkah yang selanjutnya, dengan adanya pelatihan pembekalan dalam metodologi pembelajaran.

Kemudian digunakan pula metode pendampingan tahsin dan monitoring kepribadian yang berkelanjutan. Pendampingan ini dilakukan kurang lebih selama 5 bulan masa intensif yang terbagi dalam 15 pertemuan tatap muka, diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Periode PKTQ 2017 dibagi dalam 2 periode, yaitu 5 kali pertemuan untuk program pengembangan kepribadian (akhlak) dan 10 kali pertemuan untuk program tahsin. Pada periode ini, setiap mahasiswa peserta PKTQ diwajibkan menghafalkan juz 30 dengan sistem setoran kepada asisten masing-masing. Selama proses pendampingan diadakan ujian kelayakan dalam 3 tahap untuk memindah mahasiswa tahsin yang sudah dianggap mumpuni ke dalam kelas tahfidz.

3. Monitoring Tahsin Tahfidz

a. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sebagaimana telah dideskripsikan di atas, maka proses monitoring dilakukan, terutama bagi para mahasiswa yang belum lancar dan hafal, melalui proses pembimbingan, baik oleh dosen maupun teman sebaya. Jadwal pelaksanaan monitoring dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan atas kesepakatan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbingnya. Dalam proses pembimbingan tersebut, para mahasiswa diberikan buku setoran bacaan dan hafalan al-Quran. Buku setoran tersebut merupakan bahan monitoring bagi para dosen pembimbing dan teman sebaya, guna mengetahui peningkatan terhadap bacaan dan hafalan para mahasiswa yang dibimbingnya.

Adapun kriteria kelulusan dan diberikan surat keterangan lulus tahsin tahfidz, nilai minimalnya adalah 70. Nilai tersebut artinya adalah dari aspek tahsin terketegorikan cukup konsisten dalam bacaan dan aspek tahfidz cukup lancar dalam hafalan. Sehingga dengan berbekal hafalan tersebut, para mahasiswa diharapkan di masyarakat layak untuk menjadi imam shalat maupun memimpin pengajian al-Quran. Sedangkan kriteria nilai kelulusan tahsin tahfidz, sebagai berikut:

Aspek	Nilai	Artinya
Tahsin	80 – 100	Konsisten
	70 – 79	Cukup Konsisten
	60 – 69	Kurang Konsisten
	50 – 59	Tidak Konsisten
tahfidz	80 – 100	Lancar
	70 – 79	Cukup Lancar
	60 – 69	Kurang Lancar
	50 – 59	Tidak Lancar

Tabel 5.1
Penilaian tahsin Tahfidz Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

b. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Monitoring implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz di UIN Jakarta dapat dilihat di antaranya dari cara penilaian mahasiswanya dengan struktur penilaian sebagaimana berikut:

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila masing-masing praktikum ibadah dan qira'at memperoleh nilai sekurang-kurangnya 70 (B), yakni meliputi:

1) Praktikum Ibadah

No.	Jenis Kecakapan	Rentang Nilai
1.	Bersuci dari hadast dan najis	1-100
2.	Shalat wajib dan sunnah	1-100
3.	Khutbah Jumat, Ied, dan Nikah	1-100
4.	Shalat Jumat dan makmum masbuq	1-100
5.	Shalat jama' dan qashar	1-100
6.	Sujud Syahwi, Tilawahm dan Syukur	1-100
7.	Pengurusan dan shalat jenazah	1-100
8.	Dzikir dan doa setelah shalat	1-100

Tabel 5.2
Penilaian Praktik Ibadah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Total nilai akhir (NA) praktik Ibadah:

$$NA = \frac{N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8}{8} = \dots\dots$$

8

2) Praktikum Qira'at

No.	Jenis Kecakapan	Bobot Nilai
1.	Makhraj dan Sifat	15
2.	Penguasaan Tajwid dan Gharaib	15
3.	Kelancaran Membaca	15
4.	Menulis Al-Quran	5
5.	Hafalan	
	a. Juz Amma	30
	b. Surat pilihan (sebanyak 5 surat)	20

Tabel 5.3

Penilaian Qira'at Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perhitungan nilai berdasarkan rumus di bawah ini:

Total Nilai Akhir (NA) Praktikum Qira'at:

$$NA = \frac{15N1+15N2+15N3+5N4+30N5.a+20N5.b}{100} =$$

100

Berkenaan dengan kelulusan Bimbingan Ibadah dan Qira'at perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Bila nilai ibadah dan qiraat masing-masing memperoleh minimal 70 (B), maka dinyatakan "LULUS".
2. Bila nilai masing-masing praktikum ibadah dan qiraat kurang dari 70 (B), maka dinyatakan "TIDAK LULUS" dan bagi mahasiswa bersangkutan diwajibkan ikut kembali pada dua semester berikutnya (semester III dan IV) dengan cara mendaftar ulang tanpa dipungut biaya.

3. Bila salah satu nilai praktikum Lulus, contoh: praktikum ibadah 70 (B) tetapi nilai praktikum qira'at kurang dari 70 (B), misalnya kurangnya hapalan maka mahasiswa bersangkutan dapat memperpanjang waktu bimbingan hingga satu semester kedepan (semester III) tanpa dipungut biaya dengan cara mendapatar ke Lab. FITK. Apabila mahasiswa bersangkutan masih tetap belum cukup nilainya dimasa perpanjangan maka harus membayar uang praktikum sesuai ketentuan yang berlaku disemester berikutnya (semester IV) ke bagian keuangan FITK, dan fotokopi slip pembayaran diserahkan kepada Lab. FITK.

Selain dari aspek penilaian monitoring kebijakan lulus tahsin tahfidz di UIN Syarif hidayatullah juga dapat dilihat dari instrument bimbingan yang ada di antaranya: 1) Kartu Bimbingan Praktik Ibadah dan Qira'at; 2) Buku Panduan Praktikum Ibadah dan Qiraat; dan 3) Modul Praktik Ibadah dan Qira'at. Adapun evaluasi dan monitoring rutin diadkan setiap seminggu sekali dengan mengumpulkan semua ketua rombel. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket dan tanya jawab.

c. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Monitoring dalam implementasi kebijakan tahsin tahfidz digunakan metode pendampingan tahsin dan monitoring kepribadian yang berkelanjutan. Pendampingan ini dilakukan kurang lebih selama 5 bulan masa intensif yang terbagi dalam 15 pertemuan tatap muka, diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Periode PKTQ 2017 dibagi dalam 2 periode, yaitu 5 kali pertemuan untuk program pengembangan kepribadian (akhlak) dan 10 kali pertemuan untuk program tahsin. Pada periode ini, setiap mahasiswa peserta PKTQ diwajibkan menghafalkan juz 30 dengan sistem setoran kepada asisten masing-masing. Selama proses pendampingan diadakan ujian kelayakan dalam 3 tahap untuk memindah mahasiswa tahsin yang sudah dianggap mumpuni ke dalam kelas tafidz.

Penciptaan suasana yang mendukung tahsin dan pembentukan kepribadian yang Islami tergambar dalam proses pelaksanaan asistensi oleh segenap asisten PKTQ. Dengan penggunaan metode tersebut, seorang pendamping atau asisten akan menyelami langsung tabiat dan perilaku para mahasiswa yang perlu diarahkan

dan dikuatkan. Penguatan dilakukan dengan bacaan bersama dan majlis al-Quran dalam lingkup kelompok.

Kemudian bentuk lainnya yaitu pendampingan secara sistemik melalui pembuatan modul dan konsep-konsep pengembangan kepribadian yang integratif. Di samping penyampaian melalui asisten, diharapkan bentuk ini dapat bersumbangsiah yang besar. Tahap selanjutnya dengan adanya sertifikasi al-Quran.

Pada akhir tahapan kegiatan ini. Diharapkan program yang dicanangkan member suatu pengalaman dan pembelajaran yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebagai suatu bentuk pengetahuan semata, akan tetapi menjadi sebuah rasa pengalaman yang berharga untuk diterapkan dalam perilaku.

4. Strategi Implementasi Tahsin Tahfidz

a. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Dalam rangka memperlancar terhadap kebijakan Rektor tersebut, maka FTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung membentuk unit pengembangan tahsin tahfidz. Unit pengembangan ini berfungsi sebagai unit pengembangan yang melakukan kegiatan untuk mengetes kemampuan tahsin dan tahfidz para mahasiswa. Melalui bidang ini diselenggarakan pembinaan secara intensif untuk standarisasi kemampuan baca tulis al-Quran para mahasiswa, terutama juz 30 sebagai syarat bagi mahasiswa mengikuti ujian munaqasah.³

Secara pelaksanaan tahsin tahfidz dilakukan dengan tiga cara, yaitu: tes awal (*placement test*), pembimbingan, dan tes akhir (pengujian). *Pertama*, tes awal (*placement test*). Seluruh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, melakukan tes awal (*placement test*). Tes ini dilakukan dalam rangka untuk mengelompokkan mahasiswa tiga kategori, yaitu: belum lancar, sudah lancar, dan sudah hafal (hafidz).

Selain mengikuti prosedur yang ada di unit pengembangan tahsin tahfidz, para mahasiswa FTK UIN Sunan Gunung Djati juga harus sudah lulus melalui mata kuliah praktik ibadah dan tilawah. Untuk praktik ibadah dan tilawah merupakan

³ Buku Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016 dan Surat Keputusan Rektor Nomor: 178/Un.05/LI/PP.00.9/07/2016.

syarat untuk mengikuti ujian komprehensif. Sedangkan surat keterangan lulus tahsin tahfidz yang dikeluarkan oleh unit pengembangan tahsin tahfidz merupakan syarat untuk mengikuti ujian munawaqasah.

Faktanya bahwa ada sekitar 560 orang (46%) orang mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, baik dari mahasiswa *dirasah* maupun non *dirasah*, yang belum lancar dalam membaca al-Quran. Ada sekitar 646 orang (54%) sudah lancar tapi belum hafidz, dan sisanya 55 orang (5%) yang sudah hafidz.⁴

Kedua, pembimbingan. Setelah para mahasiswa melakukan tes awal, maka ditemukan tiga kategori tersebut. Bagi mahasiswa yang belum lancar dan sudah lancar tapi belum hafidz, melakukan proses pembimbingan. Proses pembimbingan dilakukan oleh dosen maupun teman sebaya. Tugas dosen pembimbing adalah mengarahkan dan mendampingi para mahasiswa yang terkategori kepada dua hal tersebut. Dalam pembimbingan para mahasiswa diberikan buku setora bimbingan. Sedangkan tugas teman sebaya adalah mahasiswa yang mendampingi, terutama bagi mahasiswa yang belum lancar dalam membaca al-Quran. Maka proses pendampingan tersebut dilakukan oleh para mahasiswa yang sudah hafal. Artinya sebelum mereka setor hafalan ke dosen pembimbing, mereka diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan proses pendampingan oleh teman sebayanya.

Metode yang digunakan dalam pembimbingan didasarkan pada prinsip, sebagai berikut: 1) *al-Talaqqī wa al-Musyāfahah*, yaitu dosen pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing bertemu langsung, dosen pembimbing terlebih dahulu memberikan contoh dalam pelafalan bacaan/hafalan secara fasih, sehingga mahasiswa dapat melakukan peniruan; 2) *Murāja'ah*, yaitu proses pengulangan bacaan/hafalan mahasiswa yang dilakukan bersama dengan dosen pembimbing, dosen pembimbing hanya menyimak dan membetulkan kesalahan bacaan mahasiswa; dan 3) Setoran hafalan.

Ketiga, tes akhir (pengujian). Setelah para mahasiswa menyelesaikan setoran ke dosen pembimbing, maka dosen pembimbingan memberikan

⁴ Data dari Unit Pengembangan Tahsin Tahfidz Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018.

rekomendasi kepada unit pengembangan tahsin tahfidz untuk dilakukan proses tes akhir. Setelah mereka dapat menyelesaikan tes tersebut, maka unit tahsin tahfidz akan mengeluarkan surat keterangan dan nilai. Surat keterangan tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasah.

Adapun kriteria kelulusan dan diberikan surat keterangan lulus tahsin tahfidz, nilai minimalnya adalah 70. Nilai tersebut artinya adalah dari aspek tahsin terketegorikan cukup konsisten dalam bacaan dan aspek tahfidz cukup lancar dalam hafalan. Sehingga dengan berbekal hafalan tersebut, para mahasiswa diharapkan di masyarakat layak untuk menjadi imam shalat maupun memimpin pengajian al-Quran.

b. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Strategi implemementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz di UIN Syarif Hidayatullah dapat dijelaskan melalui peran organisasi pelaksana yang telah disusun berdasarkan rapat kerja Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta.

Kegiatan praktikum ibadah dan Qira'at (PIQI) secara institusional dibawah tanggung jawab Dekan FITK, secara akademik di bawah tanggungjawab Wakil Dekan 1 bidang akademik sebagai pengarah program, dan secara implementaif merupakan tanggungjawab laboratorium FITK. Adapun secara rinci dapat dijelaskan melui tugas, wewenang dan tanggungjawab PIQI sebagaimana berikut:

1. Penanggungjawab
 - a. Menerbitkan kebijakan tentang pelaksanaan PIQI.
 - b. Menetapkan arah kebijakan umum pelaksanaan PIQI.
 - c. Menetapkan dosen pembimbing PIQI.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PIQI.
2. Pengarah
 - a. Memberikan pengarahan kepada pelaksana PIQI tentang implemenasi kegiatan.
 - b. Memotivasi praktikan agar pelaksanaan PIQI berjalan efektif dan efisien.
 - c. Berpartisipasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIQI.

3. Pelaksana

- a. Mengatur dan bertanggungjawab secara eknis pelaksanaan PIQI secara keseluruhan.
- b. Menyiapkan dan mengadministrasikan calon peserta PIQI.
- c. Melaksanakan adminisrasi PIQI, termasuk menyusun rencana kebutuhan bahan, alat, dan sarana yang dibutuhkan untuk keperluan tata usaha.
- d. Berkoordinasi dengan bagian terkait
- e. Merekomendasikan dosen pembimbing.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PIQI sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode.
- g. Mengolah dan menerbitkan nilai PIQI.
- h. Membuat publikasi kegiatan PIQI.
- i. Melaporkan kegiatan PIQI kepada Dekan.

c. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Strategi yang diterapkan untuk berjalan lancarnya kebijakan lulus tahsin tahfidz ini tentu adalah dengan program yang berkualitas untuk menunjang kebijakaan itu sendiri, setidaknya itulah yang dikatakan oleh narasumber Wakil Dekan III FITK UIN Yogyakarta.

‘ya kalau strateginya itukan program kami itu program yang berkualitas itu aja strateginya, tinggal pastikan saja kalau program ini berjalan dengan lancer, sesuai dengan buku panduan itu ka nada penanggungjawab nya dan ada juga yang bagian teknisnya’

Struktur kepengurusan pelaksana Pengembangan Kepribadian dan Tahsinul Quran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2017 adalah:

Penanggung Jawab: Dr. Muqowim, M.Ag.

Ketua: M. Ibrahim N.H.

Div. Kurikulum: Rafida Rahmah Khoiriyah Khumaida

Div. Tahfidz dan Modul: Vegia Vanadya Ariny Hirza

Div Humas dan Media: Zakka Reynaldi M. Ainun Na'im.

5. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Lulus Tahsin Tahfidz

a. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Dalam penimplementasian kebijakan ini, FTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung menemukan ada beberapa faktor, baik pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor tersebut, antara lain:

- 1) Faktor pendukung. Faktor pendukung dalam pengimplementasian kebijakan tersebut adalah a) Adanya SK Rektor yang bernomor: 178/Un.05/LI/PP.00.9/07/2016 tentang Pembinaan dan Pengujian Tahsin Tahfidz Juz 30 di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sehingga para mahasiswa wajib untuk mengikuti seluruh proses kegiatan tahsin tahfidz ini; b) Adanya unit pengembangan yang membidangi secara langsung terhadap pengimplementasian kebijakan tersebut. Unit pengembangan tersebut, secara struktural menjadi tanggung jawab unit tahsin tahfidz; dan c) Adanya komitmen bersama oleh seluruh *stakeholder* FTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam mewujudkan visi misi fakultas, yaitu unggul dan kompetitif.
- 2) Faktor penghambat. Selain ada faktor pendukung, selama pengimplementasian kebijakan tersebut juga ditemukan adanya faktor penghambat, antara lain: a) Keterbatasan dosen pembimbing, karena tidak semua dosen yang ada di lingkungan FTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mau dijadikan sebagai dosen pembimbing; dan b) Ketidakkonsisten para mahasiswa dalam melakukan proses pembimbingan kepada dosen pembimbing maupun teman sebaya.

b. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian laboratorium UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditemukan faktor pendukung dan factor penghambat dari kebijakan lulus tahsin tahfidz yang sebagaimana berikut ini:

- 1) Faktor pendukung, dengan diberi legitimasi bimbingan ibadah dan qiraat yang lebih populer disebut PIQI menjadi faktor utama yang mendukung kebijakan lulus tahsin tahfidz ini. Karena dengan adanya program ini mahasiswa menjadi lebih terbiasa dengan al-Quran (membaca dan menghafal maupun menulis),

selain itu factor pendukung lainnya adalah tersedianya pembimbing yang sudah hafal al-Quran, sehingga mahasiswa yang memiliki latarbelakang hapalan semenjak di SMU/Madrasah bisa menguatkan kembali hapalannya, juga mahasiswa yang belum memiliki latarbelakang juga dapat diberitahu trik dalam membaca al-Quran menghafal ataupun menulis.

- 2) Faktor Penghambat, selain dari factor pendukung juga masih ada factor penghambat dari kebijakan lulus tahsin tahfidz ini. Yaitu tadi latarbelakang mahasiswa yang beragam semenjak perubahan nama IAIN menjadi UIN sehingga input mahasiswa berasal dari latarbelakang yang berbeda-beda di duga menjadi factor penghambat utama dalam kebijakan ini. Selain itu, faktor motivasi dan kehadiran juga diduga kuat menjadi factor lain yang menghambat implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

c. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adapun faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan di FTIK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai berikut:

- 1) Faktor pendukung, dengan diberi legitimasi bimbingan tahsin tahfidz menjadi faktor utama yang mendukung kebijakan lulus tahsin tahfidz ini. Karena dengan adanya program ini mahasiswa menjadi lebih terbiasa dengan al-Quran (membaca dan menghafal maupun menulis), selain itu factor pendukung lainnya adalah tersedianya pembimbing yang sudah hafal al-Quran, sehingga mahasiswa yang memiliki latarbelakang hapalan semenjak di SMU/Madrasah bisa menguatkan kembali hapalannya, juga mahasiswa yang belum memiliki latarbelakang juga dapat diberitahu trik dalam membaca al-Quran menghafal ataupun menulis.
- 2) Faktor Penghambat, selain dari factor pendukung juga masih ada factor penghambat dari kebijakan lulus tahsin tahfidz ini. Yaitu tadi latarbelakang mahasiswa yang beragam semenjak perubahan nama IAIN menjadi UIN sehingga input mahasiswa berasal dari latarbelakang yang berbeda-beda di duga menjadi factor penghambat utama dalam kebijakan ini. Selain itu, faktor motivasi dan kehadiran juga diduga kuat menjadi factor lain yang menghambat

implementasi kebijakan lulus tahsin tahfidz di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Pembahasan

1. Implementasi Kelembagaan

Menurut Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁵ Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.⁶ Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Pelaksanaan kebijakan tahsin tahfidz yang dilaksanakan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan hendaknya didasarkan kepada sebuah kebijakan yang dapat diakui secara formal, baik secara yuridis maupun secara *the facto*. Secara yuridis kelembagaan tahsin tahfidz harus masuk dalam lembaga yang diortakerkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hal ini akan menjadikan lembaga lebih leluasa dan mempunyai kewenangan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi yang terkait dengan tahsin tahfidz. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 1999. Statuta merupakan pedoman

⁵ Van Metter dan Van Horn, Van Meter, Donalds & Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process; a Conceptual Framework", *Administration Society*, Vol. 6, No. 4, (February 1975), 5.

⁶ Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makasar: CV. Sah Setia, 2017), 122.

dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sedangkan secara *the facto* lembaga tahsin tahfidz harus mempunyai sebuah tempat yang khusus untuk melayani setiap kegiatan mahasiswa yang akan mengikuti tahsin tahfidz. Hal ini sangat penting mengingat mahasiswa dan para petugas tahsin tahfidz harus mempunyai tempat yang nyaman dan kondusif ketika melakukan hafalan dan ujian hafalan kepada para pembimbingnya.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati, memiliki salah satu lembaga khusus yang mengengani tentang tahsin tahfidz ini. Lembaga ini bertugas untuk sebagai unit yang melaksanakan kegiatan untuk mengetes kemampuan tahsin dan tahfidz para mahasiswa di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Melalui unit ini diselenggarakan pembinaan secara intensif untuk standarisasi kemampuan baca tulis al-Quran para mahasiswa, terutama juz 30 sebagai syarat bagi mahasiswa mengikuti ujian munaqasah.

Keberadaan unit tersebut merupakan bentuk implementasi dari Surat Keputusan Rektor Nomor: 178/Un.05/LI/PP.00.9/07/2016 tentang Pembinaan dan Pengujian Tahsin Tahfidz Juz 30 dan diturunkan dalam Buku Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kedua dasar hukum tersebut yang insyaratkan bahwa seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai salah satu syarat munaqasah adalah harus lulus tahsin dan tahfidz dengan hapal minimal juz 30.⁷

Sedangkan proses tahfidz, baik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwa proses tahfidz, masuk dalam mata kuliah non SKS, melalui mata kuliah praktik tilawah. Padahal di Fakultas Tarbiyah dan

⁷ Buku Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016 dan Surat Keputusan Rektor Nomor: 178/Un.05/LI/PP.00.9/07/2016.

Keguruan UIN Sunan Gunung Djati bahwa pengelolaan tahsin tahfidz, masuk dalam mata kuliah praktik tilawah. Dan bahkan khusus di jurusan PAI, bahwa tahsin tahfidz, selain sebagai mata kuliah praktik juga masuk pada mata kuliah tahsin/tahfidz dengan bobot SKS 3.

2. Pelaksanaan Tahsin Tahfidz

Pelaksanaan tahsin tahfidz merupakan sebuah proses menghafalkan al-Quran yang bersifat sistematik untuk menyelesaikan hafalan yang telah diwajibkan oleh kampus melalui pedoman akademik. Sebagai sebuah perbandingan dalam pelaksanaan tahfidz Quran yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut: a) Setiap kelas dibagi menjadi dua rombongan belajar. Masing-masing rombel dibimbing oleh satu dosen pembimbing; b) Dosen Pembimbing mengadakan pertemuan dengan seluruh mahasiswa bimbingannya untuk menyampaikan beberapa ketentuan PIQI. Di samping itu, membuat jadwal tatap muka sesuai dengan kesepakatan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa; c) Mahasiswa melakukan pendalaman materi PIQI secara mandiri melalui Modul Praktikum; dan d) Secara bertahap (maksimal sampai 16 kali tatap muka) mahasiswa melakukan uji kecakapan sesuai tuntutan materi yang harus dikuasai.

Pelaksanaan tahsin tahfid yang dilaksanakan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati lebih memberikan bimbingan yang lebih intensif kepada mahasiswa. Pelaksanaan tahsin tahfid yang dilaksanakan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati meliputi kegiatan yang akan memfokuskan pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa. Pada setiap kelas di tiap jurusan, mahasiswa dibagi ke dalam 3-4 kelompok, sehingga setiap kelas ditangani 3-4 pembimbing dengan jumlah mahasiswa bimbingan masing-masing 10-15 orang.

Proses pembimbingan tahsin tahfidz dengan berkelompok akan mampu memberikan beberapa manfaat bagi mahasiswa. Menurut Ibrahim, dkk, pembelajaran kelompok merupakan pembelajaran yang dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan penghargaan kelompok. Siswa bekerja dalam situasi

pembelajaran kelompok didorong atau dikehendaki untuk bekerjasama pada suatu tugas dan mereka harus mengkoordinasi usahanya menyelesaikan tugasnya.⁸ Sedangkan menurut Roger dan David Johnson⁹ mengatakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif terdapat lima unsur pembelajaran yang harus diterapkan, yaitu:

Pertama, saling ketergantungan positif. Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka. Kaitannya dengan hafalan Quran dengan bimbingan kelompok, mereka dapat melakukan kerjasama ketika waktu menghafal, sehingga bias saja setiap mahasiswa saling bertukar hafalan dan bertukar tugas sebagai menghafal dan penguji.

Kedua, tanggung jawab perseorangan. Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama. Dimana tugas dan penilaian dibuat menurut rancangan pembelajaran kooperatif dan setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Kunci keberhasilan metode ini adalah persiapan guru dan penyusunan tugasnya. Penyusunan tugas ini dapat dilakukan dengan cara memberikan tanggung jawab kepada mahasiswa bimbingan harus menyelesaikan hafalan secara bersama-sama dalam waktu yang tentunya telah disepakati oleh dosen pembimbing dan mahasiswa. Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban untuk menghafal sesuai kemampuan yang dihafalkan untuk selanjutnya disetorkan ke oleh dosen pembimbing.

Ketiga, tatap muka. Setiap kelompok harus diberikan kesempatan bertatap muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi akan memberikan kesempatan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Kegiatan tatap muka tentunya banyak dilakukan dalam kegiatan bimbingan tahsin

⁸ Muslimin Ibrahim, dkk., *Pembelajaran Cooperative*, (Surabaya: Universitas Press Surabaya, 2000), 5-6.

⁹ Anita Lie, *Cooperative Learning*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 31-35.

tahfidz, hal ini mengingat kegiatan bimbingan yang dilakukan dapat mewajibkan semua mahasiswa untuk hadir dalam setiap bimbingan.

Keempat, komunikasi antar anggota. Unsur ini juga menghendaki pelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. Keberhasilan suatu kelompok tergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dalam mengutarakan pendapat mereka. Dalam proses komunikasi yang dilakukan dalam bimbingan tahsin tahfidz dapat dilakukan dengan cara pemberian berita terkait jadwal bimbingan dan jadwal hafalannya.

3. Kebijakan Pembimbingan Tahsin Tahfidz

Keajegan dalam melakukan seleksi baik untuk pembimbing maupun mahasiswa menggunakan strategi dengan berkumpul bersama membicarakan terkait mekanisme seleksi. Pada pelaksanaannya, penyeleksian dilakukan dengan cara rekomendasi dari Jurusan/Prodi masing-masing yang mengajukan sebagai dosen pembimbing tahsin tahfid. Para dosen yang sudah direkomendasikan selanjutnya dilakukan pengajuan pemberian SK kepada Dekanat. Setelah para dosen pembimbing tersebut mendapatkan SK mereka dapat langsung menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya. Sebagaimana yang sudah berjalan, bagi para dosen diberikan tugas membimbing dan melakukan pengujian terhadap hafalan yang sudah dihafal oleh mahasiswa.

Proses pelaksanaan pembimbingan disesuaikan atas kesepakatan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa. Artinya pihak unit tahsin tahfidz Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tidak memberikan jadwal yang jelas dalam pelaksanaan proses pembimbingan. Yang menjadi batas akhri selesai pembimbingan, ketika mahasiswa sudah menyelesaikan setoran hafalan juz 30 kepada dosen pembimbing.

4. Metode Tahsin Tahfidz

Metode merupakan salah satu strategi atau cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang hendak dicapai, semakin tepat metode yang digunakan oleh seorang guru maka pembelajaran akan semakin baik. Metode

berasal dari kata *methodos* dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Sudjana berpendapat bahwa metode merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu.¹⁰ Pendekatan bersifat aksiomatis yaitu pendekatan yang sudah jelas kebenarannya, sedangkan metode bersifat prosedural yaitu pendekatan dengan menerapkan langkah-langkah. Salamun menyatakan bahwa metode pembelajaran ialah sebuah cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Hal itu berarti pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang ingin dicapai.¹¹

Metode menghafal al-Quran bagi tiap-tiap orang berbeda-beda. Maka tidak heran kita menjumpai buku-buku cara cepat menghafal al-Quran. Dari kesemuanya itu, kita bisa menggunakan metode apa saja yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dari sekian banyak metode menghafal, secara umum langkah-langkah yang digunakan dalam menghafal Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Metode yang digunakan dalam pembimbingan didasarkan pada prinsip, sebagai berikut:

1. *al-Talaqqī wa al-Musyāfahah*

Yaitu dosen pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing bertemu langsung, dosen pembimbing terlebih dahulu memberikan contoh dalam pelafalan bacaan/hafalan secara fasih, sehingga mahasiswa dapat melakukan peniruan. Metode ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu membaca ayat yang hendak dihafal dengan tartil dan teliti. Hal ini dimaksud agar terhindar dari kesalahan dalam menghafal dan teratur dalam bacaan. Hafalan yang terlebih dahulu dibaca dengan tartil dan teliti akan menghasilkan kualitas bacaan yang baik dan benar. Bacaan yang baik dan benar hanya dapat diperoleh apabila seseorang memperhatikan

¹⁰ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 76.

¹¹ Akhmat Sudrajat, *Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan Model Pembelajaran*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 7.

huruf-huruf yang terdapat dalam al-Quran, memperhatikan panjang dan pendeknya bacaan, hukum-hukum tajwid, maupun *waqof* dan *ibtida'*.

2. *Murāja'ah*

Yaitu proses pengulangan bacaan/hafalan mahasiswa yang dilakukan bersama dengan dosen pembimbing, dosen pembimbing hanya menyimak dan membetulkan kesalahan bacaan mahasiswa. Bacaan yang diulang sebanyak 20 kali akan membuat hafalan lebih kuat dari pada membacanya sekali kemudian langsung dihafal. Setelah satu ayat dihafal, kemudian dilancarkan sampai benar-benar lancar. Apabila satu ayat belum lancar, maka jangan menambah ayat yang baru. Lancar dan kurang lancarnya ayat yang telah dihafalkan dirasakan sendiri oleh penghafal itu sendiri. Satu ayat yang belum lancar kemudian mencoba menambah ayat yang baru hanya akan membuat hafalan tidak lancar secara keseluruhan. Dan ini akan membuat proses menghafal dan melancarkan semakin memakan waktu yang cukup lama. Pelaksanaan *murāja'ah* dilakukan kepada teman sebaya. Jika mahasiswa sudah yakin dengan hafalannya, maka dia berhak untuk menyetorkan hafalan ke dosen pembimbing.

3. Setoran hafalan

Istilah yang biasa digunakan para penghafal al-Quran untuk menyimakan hafalannya kepada dosen pembimbing adalah setoran. Dosen pembimbing akan menyimak bacaan mahasiswa sampai menyelesaikan hafalannya. Apabila terjadi kekeliruan ataupun kesalahan, dosen pembimbing akan langsung mengingatkan di mana letak kekeliruan hafalannya. Persiapan sebelum setoran sangat penting supaya ketika setoran bisa maksimal. Untuk itu, kelancaran hafalan harus benar-benar dipersiapkan dengan matang agar ketika setoran tidak hanya asal setor hafalan. Sebaiknya persiapan setoran dilakukan jauh sebelum maju kepada dosen pembimbing.

5. Evaluasi Tahsin Tahfidz

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan

serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran.¹² Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi tahsin tahfidz yang dapat dilakukan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, melalui pengujian oleh tim pengujian dari unit tahsin tahfidz. Ujian tahsin tahfidz dilaksanakan setelah: 1) Dosen pembimbing dan mahasiswa telah melakukan pertemuan dan menyelesaikan setoran hafalan ke dosen pembimbing; 2) Mahasiswa memiliki kemampuan bacaan dan hafalan yang layak untuk diujikan; dan 3) Waktu dan tempat yang memungkinkan untuk melakukan pengujian.

Adapun aspek-aspek yang diujikan dengan mempertimbangkan bacaan dan hafalan mahasiswa dalam hal: 1) *Fashahah* yang meliputi makharijul huruf, sifat huruf, dan kaidah-kaidah ilmu tajwid; 2) *ahkām al-Waqfi wa al-Ibtida*, yang berkaitan dengan berhenti dan memulai bacaan; dan 3) Kelancaran hafalan, yakni kemampuan mahasiswa dalam melafalkan bacaan dan hafalan secara lancar dan tertil.

Mahasiswa dinyatakan lulus, kalau nilai tahsin tahfidz minimal 70. Nilai 70 berarti aspek tahsin sudah cukup konsisten dalam bacaan dan aspek tahfidz sudah cukup lancar dalam hafalannya. Sehingga diharapkan dengan berbekal tahsin tahfidz tersebut, para mahasiswa dapat menjadi imam shalat dan memimpin pengajian di masyarakat.

¹² Jhon M. Echols dan Ahmad Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 220.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana tahapan berikutnya melihat hasil dari hasil dan pembahasan penelitian di atas adalah memaksimalkan monitoring dan strategi-strategi dalam pelaksanaan kebijakan lulus tahsin tahfidz. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan lebih difokuskan pada kedua hal tersebut. Sehingga pada akhirnya kebijakan tersebut akan semakin komprehensif dan faktual, karena berbasis kepada hasil penelitian.

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan lulus tahsin tahfidz kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sudah tepat. Karena hal ini sesuai dengan visi dan misi, baik universitas maupun fakultas. Terlebih bahwa bangunan image (*image building*) dari masyarakat bahwa lulusan UIN harus sudah fasih dalam membaca al-Quran. Dengan demikian, program lulusan tahsin tahfidz ini merupakan solusi yang terbaik, untuk menunjang *image building* masyarakat tersebut. Adapun secara rinci simpulan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, implementasi kelembagaan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati, memiliki salah satu lembaga khusus yang mengenai tentang tahsin tahfidz ini. Lembaga ini bertugas untuk sebagai unit yang melaksanakan kegiatan untuk mengetes kemampuan tahsin dan tahfidz para mahasiswa di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Melalui unit ini diselenggarakan pembinaan secara intensif untuk standarisasi kemampuan baca tulis al-Quran para mahasiswa, terutama juz 30 sebagai syarat bagi mahasiswa mengikuti ujian munaqasah. Keberadaan unit tersebut merupakan bentuk implementasi dari Surat Keputusan Rektor Nomor: 178/Un.05/LI/PP.00.9/07/2016 tentang Pembinaan dan Pengujian Tahsin Tahfidz Juz 30 dan diturunkan dalam Buku Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kedua dasar hukum tersebut yang insyartkan bahwa seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai salah satu syarat munaqasah adalah harus lulus tahsin dan tahfidz dengan hapal minimal juz 30.

Kedua, pelaksanaan tahsin tahfidz. Pelaksanaan tahsin tahfid yang dilaksanakan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati lebih memberikan bimbingan yang lebih intensif kepada mahasiswa. Pelaksanaan tahsin tahfid yang dilaksanakan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati meliputi kegiatan yang akan memfokuskan pembimbingan yang dilakukan

oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa. Pada setiap kelas di tiap jurusan, mahasiswa dibagi ke dalam 3-4 kelompok, sehingga setiap kelas ditangani 3-4 pembimbing dengan jumlah mahasiswa bimbingan masing-masing 10-15 orang.

Ketiga, kebijakan pembimbingan tahsin tahfidz. Proses pembimbingan dilakukan setelah ada SK dari Dekanat. Setelah para dosen pembimbing tersebut mendapatkan SK mereka dapat langsung menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya. Sebagaimana yang sudah berjalan, bagi para dosen diberikan tugas membimbing dan melakukan pengujian terhadap hafalan yang sudah dihafal oleh mahasiswa. Proses pelaksanaan pembimbingan disesuaikan atas kesepakatan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa. Artinya pihak unit tahsin tahfidz Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tidak memberikan jadwal yang jelas dalam pelaksanaan proses pembimbingan. Yang menjadi batas akhir selesai pembimbingan, ketika mahasiswa sudah menyelesaikan setoran hafalan juz 30 kepada dosen pembimbing.

Keempat, metode tahsin tahfidz. Metode yang digunakan dalam pembimbingan didasarkan pada prinsip, sebagai berikut: 1) *al-Talaqqī wa al-Musyāfahah*. Yaitu dosen pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing bertemu langsung, dosen pembimbing terlebih dahulu memberikan contoh dalam pelafalan bacaan/hafalan secara fasih, sehingga mahasiswa dapat melakukan peniruan. Metode ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu membaca ayat yang hendak dihafal dengan tartil dan teliti. Hal ini dimaksud agar terhindar dari kesalahan dalam menghafal dan teratur dalam bacaan. Hafalan yang terlebih dahulu dibaca dengan tartil dan teliti akan menghasilkan kualitas bacaan yang baik dan benar. Bacaan yang baik dan benar hanya dapat diperoleh apabila seseorang memperhatikan huruf-huruf yang terdapat dalam al-Quran, memperhatikan panjang dan pendeknya bacaan, hukum-hukum tajwid, maupun waqof dan ibtida'; 2) *Murāja'ah*. Yaitu proses pengulangan bacaan/hafalan mahasiswa yang dilakukan bersama dengan dosen pembimbing, dosen pembimbing hanya menyimak dan membetulkan kesalahan bacaan mahasiswa. Bacaan yang diulang sebanyak 20 kali akan membuat hafalan lebih kuat dari pada membacanya sekali kemudian langsung dihafal. Setelah satu ayat dihafal, kemudian dilancarkan sampai benar-benar lancar. Apabila

satu ayat belum lancar, maka jangan menambah ayat yang baru. Lancar dan kurang lancarnya ayat yang telah dihafalkan dirasakan sendiri oleh penghafal itu sendiri. Satu ayat yang belum lancar kemudian mencoba menambah ayat yang baru hanya akan membuat hafalan tidak lancar secara keseluruhan. Dan ini akan membuat proses menghafal dan melancarkan semakin memakan waktu yang cukup lama. Pelaksanaan *murāja'ah* dilakukan kepada teman sebaya. Jika mahasiswa sudah yakin dengan hafalannya, maka dia berhak untuk menyetorkan hafalan ke dosen pembimbing; dan 3) Setoran hafalan. Dosen pembimbing akan menyimak bacaan mahasiswa sampai menyelesaikan hafalannya. Apabila terjadi kekeliruan ataupun kesalahan, dosen pembimbing akan langsung mengingatkan di mana letak kekeliruan hafalannya. Persiapan sebelum setoran sangat penting supaya ketika setoran bisa maksimal. Untuk itu, kelancaran hafalan harus benar-benar dipersiapkan dengan matang agar ketika setoran tidak hanya asal setor hafalan. Sebaiknya persiapan setoran dilakukan jauh sebelum maju kepada dosen pembimbing.

Kelima, evaluasi tahsin tahfidz. Evaluasi tahsin tahfidz yang dapat dilakukan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, melalui pengujian oleh tim pengujian dari unit tahsin tahfidz. Ujian tahsin tahfidz dilaksanakan setelah: 1) Dosen pembimbing dan mahasiswa telah melakukan pertemuan dan menyelesaikan setoran hafalan ke dosen pembimbing; 2) Mahasiswa memiliki kemampuan bacaan dan hafalan yang layak untuk diujikan; dan 3) Waktu dan tempat yang memungkinkan untuk melakukan pengujian. Adapun aspek-aspek yang diujikan dengan mempertimbangkan bacaan dan hafalan mahasiswa dalam hal: 1) Fashahah yang meliputi makharijul huruf, sifat huruf, dan kaidah-kaidah ilmu tajwid; 2) ahkām al-Waqfi wa al-Ibtida, yang berkaitan dengan berhenti dan memulai bacaan; dan 3) Kelancaran hafalan, yakni kemampuan mahasiswa dalam melafalkan bacaan dan hafalan secara lancar dan tertil.

Mahasiswa dinyatakan lulus, kalau nilai tahsin tahfidz minimal 70. Nilai 70 berarti aspek tahsin sudah cukup konsisten dalam bacaan dan aspek tahfidz sudah cukup lancar dalam hafalannya. Sehingga diharapkan dengan berbekal tahsin

tahfidz tersebut, para mahasiswa dapat menjadi imam shalat dan memimpin pengajian di masyarakat.

B. Saran

Sebagaimana yang terdapat di Bab VI tentang rencana tahapan berikutnya, oleh karena itu, penelitian menyarankan kepada para peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lanjutan dalam hal monitoring dan strategi-strategi dalam pelaksanaan kebijakan lulus tahsin tahfidz. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan lebih difokuskan pada kedua hal tersebut. Sehingga pada akhirnya kebijakan tersebut akan semakin komprehensif dan faktual, karena berbasis kepada hasil penelitian.

DAFTAR PUSTKA

- Abdul Wahab Solikhin, *Analisis Kebijakan dan Formulasi dan Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Akhmat Sudrajat, *Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan Model Pembelajaran*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009).
- Anita Lie, *Cooperative Learning*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.
- Buku Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Cahyono, *Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (CAROK) Etnis Madura melalui Criminal Justice System*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Creswell, *Educational Reaserch; Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Boston: Pearson Education, Inc., 2012.
- Djemari Mardapi, *Pengukuran, Penilaian & Evaluasi Pendidikan*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2016.
- Inu Kencana Syafiie, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*, Yogyakarta: Averros Press, 2008.
- James. E. Anderson, *Public Policy Making*, USA: Houghton Mifflin Company, 2003.
- Jhon M. Echols dan Ahmad Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-594C/Un.05/III.2/PP.00.9/07/2016, tanggal 03 Juli 2016 tentang Revisi Rencana Strategis Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2015-2019.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

- M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis; a Methodes Sourcebook*, The United States of America: Arizona State University, 2014.
- Muslimin Ibrahim, dkk., *Pembelajaran Cooperative*, Surabaya: Universitas Press Surabaya, 2000.
- Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Robert K. Yin, *Case Study Research; Design and Methods*, London: SEGA Publications Inc., 2009.
- Sjahrir, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Penelitian Pendekatan Praktik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Surat Keputusan Rektor Nomor: 178/Un.05/LI/PP.00.9/07/2016 tentang Pembinaan dan Pengujian Tahsin Tahfidz Juz 30 di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, Makasar: CV. Sah Setia, 2017.

Van Meter, Donalds & Carl E. Van Horn, *The Policy Implementation Process; a Conceptual Framework*, "Administration Society", Vol. 6, No. 4, February 1975.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998.